

Perkuat Kualitas Data, BPS Buton Selatan Dorong Peningkatan Statistik Sektorial dan IPS 2026



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BPS Busel bersama tim Pembinaan Statistik Sektorial (PSS) melaksanakan rapat koordinasi lintas Organisasi Perang-

Lanjut ke Hal: 7

BUTON SELATAN, BP - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus berupaya paya mendorong peningkatan statistik sektorial dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2026.

Musrenbang RKPD 2027, Amirul Tamim Soroti Tata Ruang dan Akses Transportasi Udara dan Hinterland Jadi Kunci Masa Depan Baubau



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Penguatan konektivitas wilayah dan penataan ruang menjadi kunci utama dalam mendorong Kota Baubau sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Sulawesi Tenggara. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Baubau Tahun 2027 yang digelar di aula Kantor Wali Kota Baubau, Senin (8/4/2026).

Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, MZ. Amirul Tamim, dalam forum tersebut menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sektor

transportasi, khususnya transportasi udara, guna meningkatkan konektivitas Baubau dengan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, konektivitas yang baik akan memperkuat posisi tawar Baubau sebagai pusat ekonomi dan simpul pertumbuhan kawasan di masa depan.

"Aksesibilitas menjadi kunci. Tanpa konektivitas yang kuat, potensi daerah tidak akan berkembang maksimal," ujarnya dalam forum tersebut.

Selain konektivitas, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya optimalisasi wilayah hinterland atau daerah penyangga yang berada di sekitar

Kota Baubau, termasuk Kabupaten Buton Selatan.

Ia menilai, wilayah hinterland dapat difungsikan secara maksimal sebagai kawasan strategis, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan maupun sebagai pusat logistik dan pergudangan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur pada masa sekarang akan berdampak panjang bagi generasi mendatang.

"Jika kita salah dalam meletakkan dasar pembangunan dan tata ruang hari ini, maka harganya akan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Halal Bi Halal Teguhkan Persatuan, Warga dan Pemda Berbaur



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar kegiatan Halal Bi Halal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan silaturahmi keluarga di Waburi Park, Minggu (5/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat hubungan sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat pasca perayaan Idul Fitri.

Suasana penuh keakraban tampak mewarnai jalannya kegiatan. Warga dari berbagai kalangan hadir dan berbaur bersama jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dalam nuansa

kekeluargaan yang hangat.

Interaksi langsung antara masyarakat dan pimpinan daerah terlihat ketika Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, bersama warga saling bersalaman dan berbincang santai. Momentum ini dimanfaatkan warga untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan pemerintah.

Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bi Halal memiliki makna lebih dari sekadar tradisi tahunan.

"Halal Bi Halal bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang untuk saling memaafkan dan

memperkuat ikatan persaudaraan di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat kebersamaan yang lahir dari momentum Idul Fitri harus terus dijaga sebagai fondasi dalam pembangunan daerah.

"Dengan persatuan dan kekompakan, kita bisa mendorong Buton Selatan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera," tambahnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Buton Selatan, Ny. Hj. Sitti Norma Adios, juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lanjut ke Hal: 7

STAI YPIQ Baubau Gelar Ujian Proposal, Dorong Kualitas Penelitian, Mahasiswa Antusias Ikuti Ujian Proposal Skripsi



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP -STAI YPIQ Baubau kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan ujian proposal skripsi yang diikuti mahasiswa dari berbagai program studi, sebagai tahapan awal menuju penyusunan karya ilmiah.

Kegiatan akademik tersebut berlangsung di kampus yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Baubau, dengan suasana tertib dan kondusif selama tiga hari, yakni 9 hingga 11 Maret 2026.

Ujian proposal skripsi ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi, karena berfungsi sebagai mekanisme evaluasi awal terhadap rencana

penelitian mahasiswa sebelum memasuki tahap pengumpulan data dan penulisan skripsi secara utuh.

Secara historis, model ujian proposal telah lama menjadi tradisi akademik di berbagai perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun internasional. Di Indonesia, sistem ini

Lanjut ke Hal: 7

Perkuat Kualitas Data, BPS Buton Selatan Dorong Peningkatan Statistik Sektorial dan IPS 2026

kat Daerah (OPD) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (9/4/2026).

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai wali data daerah, Bappeda sebagai koordinator perencanaan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi fokus penilaian IPS 2026, yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kesinambungan pembinaan statistik sektoral yang telah dimulai sejak 2025. Melalui forum tersebut, seluruh pihak didorong untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi kesiapan dalam menghadapi penilaian IPS tahun 2026.

Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, mengatakan, bahwa peningkatan kualitas data membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, data yang akurat dan berkualitas

tidak dapat dihasilkan oleh satu instansi saja, melainkan melalui kerja sama yang terintegrasi antar perangkat daerah.

:Melalui pembinaan ini, kami berharap OPD yang menjadi lokus penilaian dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan data sehingga menghasilkan nilai IPS yang optimal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Bappeda dan Dinas Kominfo dalam mengawal implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Dengan

tata kelola data yang semakin baik, kebijakan pembangunan diharapkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan berbasis data.

"Rapat koordinasi ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antar perangkat daerah dalam menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Buton Selatan diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan," tutup La Ode Ikhsanuddin Hamid. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Halal Bi Halal Teguhkan Persatuan, Warga dan Pemda Berbaur

"Silaturahmi seperti ini harus terus dilestarikan karena menjadi dasar terciptanya keharmonisan keluarga dan masyarakat," tuturnya.

Kegiatan yang mengusung tema "Mari satukan hati, eratkan kasih, dalam merajut persaudaraan" ini berlangsung khidmat dan diisi dengan nuansa religi yang memperkuat nilai kebersamaan.

Secara historis, tradisi Halal Bi Halal telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak era awal

kemerdekaan. Istilah ini dikenal luas setelah dipopulerkan pada masa Presiden Soekarno sebagai sarana rekonsiliasi nasional pasca konflik politik.

Dalam konteks global, nilai yang terkandung dalam Halal Bi Halal sejalan dengan prinsip rekonsiliasi sosial yang juga dipraktikkan di berbagai negara, seperti tradisi "reconciliation gathering" di sejumlah negara pasca konflik untuk membangun kembali hubungan sosial masyarakat.

Di Indonesia sendiri, tradisi ini

berkembang menjadi agenda tahunan pasca Idul Fitri yang tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga, tetapi juga institusi pemerintahan, organisasi, hingga komunitas masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menilai kegiatan Halal Bi Halal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat solidaritas masyarakat di tengah dinamika pembangunan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antarwarga semakin har-

monis dan tercipta lingkungan yang rukun, damai, serta penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut juga menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga pada kekuatan sosial dan nilai-nilai persaudaraan.

Dengan demikian, Halal Bi Halal di Buton Selatan tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga sarana memperkuat fondasi sosial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (*)

STAI YPIQ Baubau Gelar Ujian Proposal, Dorong Kualitas Penelitian, Mahasiswa Antusias Ikuti Ujian Proposal Skripsi

berkembang pesat sejak era reformasi pendidikan tinggi pada awal 2000-an yang menekankan penjaminan mutu. Sementara secara global, praktik serupa telah diterapkan di universitas-universitas di Amerika Serikat dan Inggris sebagai bagian dari standar penelitian ilmiah.

Ketua Panitia Ujian Proposal, Anarida, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menguji kesiapan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran akademik yang penting.

"Ujian proposal ini merupakan tahapan penting yang harus dilalui mahasiswa sebelum menyusun skripsi secara menyeluruh," ujar Anarida saat ditemui awak media, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, proses ujian berlangsung secara interaktif. Mahasiswa mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hingga metode penelitian di hadapan dosen penguji yang kemudian memberikan masukan konstruktif.

"Diskusi yang terjadi dalam ujian membantu mahasiswa menyempurnakan rancangan penelitian agar lebih terarah dan sistematis," katanya.

Sejak pagi hari, suasana kampus

tampak dipadati mahasiswa yang mengenakan pakaian formal hitam putih. Mereka menunggu giliran dengan penuh kesiapan dan kepercayaan diri untuk memasuki ruang ujian.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari tiga program studi, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), dan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang seluruhnya berada di bawah naungan STAI YPIQ Baubau.

Dalam pelaksanaannya, panitia menerapkan penjadwalan yang terstruktur serta koordinasi yang matang sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

"Satu per satu mahasiswa memasuki ruang sidang untuk memaparkan proposal penelitian di hadapan dosen penguji," tambah Anarida.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen kampus terhadap peningkatan mutu akademik dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai tahapan evaluasi, termasuk ujian proposal skripsi.

"Melalui proses ini, kami berharap mahasiswa mampu menghasilkan penelitian yang matang, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ujian proposal skripsi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan berpikir kritis mahasiswa, menyusun argumen ilmiah, serta mempertanggungjawabkan ide penelitian secara akademik.

Masukan dari dosen penguji menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memperbaiki dan menyempurnakan proposal sebelum memasuki tahap penelitian lapangan.

Selain itu, kegiatan ini turut melatih keberanian mahasiswa dalam menyampaikan gagasan secara sistematis dan logis di forum akademik, yang menjadi salah satu kompetensi penting lulusan perguruan tinggi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, STAI YPIQ Baubau menunjukkan konsistensinya dalam menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas dan berorientasi pada pengembangan keilmuan Islam.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi di Indonesia yang terus mendorong peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah sebagai indikator utama daya saing lulusan di tingkat global. (*)

Musrenbang RKPD 2027, Amirul Tamim Soroti Tata Ruang dan Akses Transportasi Udara dan Hinterland Jadi Kunci Masa Depan Baubau

dibayar mahal oleh generasi mendatang," tegasnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya penataan kawasan strategis seperti Pantai Kamali, Kotamara Baubau, Palagimata, dan Wantiro.

Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik yang berpihak pada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan strategis tidak selalu

membutuhkan anggaran besar apabila dirancang secara matang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan tenaga teknokrat.

"Efisiensi bukan alasan untuk tidak berbuat dalam membangun Kota Baubau," kata Amirul Tamim.

Dalam pemaparnya, ia juga mengingatkan aparat pemerintah agar tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merancang program pembangunan.

Menurutnya, pendekatan pem-

angunan harus berbasis pada kemampuan dan potensi ekonomi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan.

"Jangan hanya menghitung APBD, tetapi hitung juga kemampuan masyarakat," ujarnya.

Secara historis, konsep pembangunan berbasis masyarakat dan efisiensi anggaran telah menjadi perhatian global sejak era reformasi sektor publik pada dekade 1990-an, yang mendorong lahirnya paradigma good governance di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri, pendekatan tersebut mulai

diperkuat pasca-era Reformasi 1998, yang menandai perubahan sistem pemerintahan menuju desentralisasi dan otonomi daerah.

Kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Baubau, untuk lebih inovatif dalam merancang pembangunan berbasis potensi lokal.

Dalam konteks global, kota-kota pesisir di berbagai negara seperti di Asia Tenggara juga mengadopsi penguatan konektivitas dan tata ruang sebagai strategi utama da-

lam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Amirul Tamim menilai, Baubau memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut, terlebih dengan posisinya yang strategis dan potensinya sebagai calon ibu kota provinsi di masa depan.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan Pemerintah Kota Baubau dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya adaptif terhadap keterbatasan anggaran, tetapi juga inovatif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. (*)

Jimly Minta Pemerintah Tak Respon Berlebihan Isu People Power Yang Disampaikan Saiful Mujani



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pernyataan Saiful Mujani terkait wacana menjatuhkan Presiden Prabowo tidak perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, meminta pemerintah tidak bereaksi berlebihan terhadap pernyataan Saiful Mujani yang menyerukan konsolidasi politik untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, respons yang berlebihan justru berpotensi memperluas ketegangan antara negara dan masyarakat.

Jimly menilai pernyataan tersebut tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik nasional karena terdapat keseimbangan opini di ruang publik. Ia menyebut suara rasional yang menolak wacana tersebut juga cukup kuat.

"Pemerintah tidak perlu respons terlalu serius, santai saja karena tidak akan berpengaruh," ujar Jimly, Jumat (10/4).

Menurut Jimly, wacana menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusi bertentangan dengan prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menegaskan

bahwa pergantian kepala negara telah diatur secara tegas melalui mekanisme konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, proses pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme impeachment yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Pergantian presiden sudah diatur dalam konstitusi melalui impeachment, bukan melalui tekanan massa," kata Jimly menegaskan. Ia juga mengkritik gaya komunikasi Mujani yang dinilai kurang terukur dan berpotensi memicu tafsir provokatif di tengah masyarakat.

Meski demikian, Jimly mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap angkuh dalam menghadapi dinamika politik. Ia menilai pendekatan komunikasi yang lebih lembut justru diperlukan untuk meredakan potensi eskalasi.

"Perlu komunikasi yang lebih lembut dari presiden sendiri agar tidak memicu ke-

arahan publik," ujarnya.

Jimly bahkan menyinggung praktik komunikasi politik pada masa Soeharto yang dinilainya lebiterukur dalam menjaga stabilitas sosial, meski dalam konteks politik yang berbeda.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan belum mencermati secara rinci pernyataan Mujani. Ia menegaskan pemerintah saat ini fokus pada agenda strategis nasional.

"Bapak Presiden sedang fokus pada hal-hal besar dan strategis," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Saiful Mujani membantah bahwa pernyataannya merupakan bentuk makar. Ia menegaskan bahwa ajakan tersebut merupakan bagian dari ekspresi politik dalam sistem demokrasi.

Menurut Mujani, sikap politik merupakan bagian dari partisipasi warga negara yang sah selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum.

Dalam sejarah Indonesia, dinamika politik

berbasis tekanan massa pernah terjadi pada peristiwa Reformasi 1998 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Namun, pascareformasi, sistem ketatanegaraan diperkuat untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan melalui jalur konstitusional.

Secara global, praktik impeachment juga menjadi mekanisme utama dalam sistem demokrasi modern, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dalam sejumlah kasus presiden yang menghadapi proses politik di parlemen.

Pengamat menilai perdebatan terkait batas antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap konstitusi akan terus menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.

Pemerintah pun diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara respons politik dan stabilitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi. (*)

DPR Kritik Skema War Tiket Haji, Ancam Jemaah Antrean Puluhan Tahun

JAKARTA, BP-Wacana penerapan sistem 'war tiket' dalam penyelenggaraan ibadah haji yang diusulkan pemerintah menuai sorotan tajam dari DPR RI. Skema yang memungkinkan calon jemaah mendapatkan kuota secara cepat dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan akses serta mengabaikan prinsip keadilan yang selama ini dijaga dalam sistem antrean nasional.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa ide tersebut muncul sebagai bagian dari pemikiran internal kementerian guna mencari solusi atas lamanya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Gagasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2025 M di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Banten.

Ia menilai perlu ada alternatif kebijakan yang lebih progresif agar calon jemaah tidak harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. "Apakah perlu antrean yang begitu lama, atau kita kembali ke sistem sebelum ada pengelolaan dana modern," ujarnya.

Namun, gagasan tersebut langsung mendapat respons kritis dari DPR, terutama Komisi VIII yang membidangi urusan keagamaan. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, mempertanyakan dasar hukum dari usulan tersebut.

Menurut Marwan, perubahan sistem penyelenggaraan haji tidak dapat dilakukan tanpa landasan regulasi yang kuat, mengingat Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai payung hukum utama.

Ia menegaskan bahwa sistem antrean berbasis nomor porsi selama ini dirancang untuk menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat. "Kalau ini hanya wacana, silakan dikaji. Tapi aspek legalitas dan dampaknya harus

jelas, jangan sampai menimbulkan keresahan," kata Marwan.

Penolakan juga datang dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya. Ia menilai skema war tiket berpotensi hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan kemampuan finansial lebih baik.

"Atalia menyebutkan, 'Jika sistem ini diterapkan, yang menang adalah mereka yang punya gawai cepat, internet kuat, dan dana siap. Bagaimana dengan masyarakat kecil dan lansia?'" ujarnya.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat di daerah yang telah menabung bertahun-tahun justru berpotensi tersingkir oleh sistem yang mengandalkan kecepatan akses dan transaksi.

"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang menabung puluhan tahun, atau kakek-nenek yang tidak terbiasa dengan teknologi? Mereka bisa kehilangan kesempatan," kata Atalia.

Selain aspek keadilan, DPR juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari perubahan sistem tersebut. Saat ini, dana setoran awal jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menghasilkan nilai manfaat.

Skema tersebut memungkinkan adanya subsidi biaya haji sehingga beban jemaah dapat ditekan. Jika sistem antrean dihapus dan diganti dengan pembayaran penuh di awal, maka dana kelolaan berpotensi menurun signifikan. "Kondisi ini bisa berdampak pada kenaikan biaya haji karena tidak ada lagi subsidi dari hasil pengelolaan dana," ujar Atalia.

Secara historis, sistem antrean haji di Indonesia mulai mengalami lonjakan sejak dekade 1990-an seiring meningkatnya jumlah umat Islam yang mampu secara finansial. Reformasi pengelo-

laan keuangan haji melalui pembentukan BPKH pada 2017 menjadi upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Di tingkat global, negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Malaysia dan Turki juga menerapkan sistem kuota dan antrean berbasis pendaftaran, bukan mekanisme cepat-cepat, guna menjaga keadilan distribusi.

Arab Saudi sebagai penyelenggara haji dunia menetapkan kuota berdasarkan proporsi jumlah penduduk Muslim tiap negara, yakni sekitar 1.000 jemaah per satu juta penduduk. Kebijakan ini menjadi faktor utama panjangnya antrean di negara dengan jumlah Muslim besar seperti Indonesia.

Dalam konteks tersebut, DPR menilai solusi atas panjangnya antrean tidak bisa dilakukan secara instan melalui mekanisme pasar seperti war tiket, melainkan melalui pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Marwan menegaskan, sistem yang ada saat ini juga telah mengatur jeda waktu bagi jemaah yang sudah berhaji agar memberi kesempatan kepada yang belum. "Ini bagian dari upaya keadilan sosial agar semua punya peluang," katanya.

DPR pun meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa kajian akademis yang matang serta tanpa melibatkan partisipasi publik.

Atalia menegaskan bahwa kebijakan haji menyangkut jutaan masyarakat yang telah menunggu dalam antrean panjang. "Ini bukan sekadar inovasi, tetapi menyangkut keadilan bagi lebih dari lima juta calon jemaah," ujarnya.

Hingga saat ini, wacana war tiket haji masih berada pada tahap awal pembahasan di internal pemerintah dan belum menjadi kebijakan resmi. (*)

Sultra Percepat Penurunan Stunting Lewat Intervensi Terpadu 2026



emerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan penurunan signifikan angka stunting dari posisi saat ini sebesar 26,1 persen

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan penurunan signifikan angka stunting dari posisi saat ini sebesar 26,1 persen melalui penguatan intervensi spesifik yang dilakukan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan sepanjang 2026.

Upaya tersebut ditegaskan dalam pertemuan evaluasi pelaksanaan intervensi spesifik stunting tingkat provinsi yang digelar di Kendari, Rabu (8/4/2026), dengan melibatkan seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra sebagai bagian dari konsolidasi program lintas wilayah.

Wakil Gubernur Sultra, Dr. Ir. Hugu, M.Ling, menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi menyangkut kualitas generasi. Ini adalah investasi jangka panjang bagi daerah,” kata Hugu dalam arahannya.

Ia menambah-

kan, pemerintah daerah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga mendekati rata-rata nasional, bahkan diupayakan dapat ditekan hingga sekitar 5 persen melalui berbagai intervensi strategis.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sultra mengedepankan dua pendekatan utama, yakni promotif dan kuratif. Pendekatan promotif dilakukan melalui edukasi intensif terkait pola makan bergizi seimbang, terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga.

Sementara itu, pendekatan kuratif diarahkan pada penanganan medis terhadap anak yang mengalami stunting akibat faktor kesehatan, termasuk penyakit penyerta yang menghambat penyerapan nutrisi.

“Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi sejak awal kehidupan, dampaknya akan panjang, mulai dari kemampuan belajar hingga produktivitas saat dewasa,” ujar Hugu.

Selain intervensi langsung, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Perencanaan hingga evaluasi program dilakukan secara bersama antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Evaluasi berkala dijadwalkan berlangsung pada pertengahan dan akhir tahun sebagai instrumen pengendalian program sekaligus dasar penyusunan strategi lanjutan.

Pendekatan berbasis perubahan perilaku masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai bahwa faktor budaya dan kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanganan stunting.

“Perubahan perilaku adalah kunci. Tanpa itu, intervensi teknis tidak akan maksimal,” kata Hugu menegaskan.

Secara historis, upaya penurunan stunting di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting nasional turun dari sekitar 37 persen pada 2013 menjadi sekitar 21,6 persen pada 2022.

Pemerintah pusat bahkan menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14 persen sebagai bagian dari

agenda pembangunan sumber daya manusia unggul.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 148 juta anak balita di dunia mengalami stunting pada 2022, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara berkembang akibat keterbatasan akses gizi dan layanan kesehatan.

Pengalaman sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada integrasi program gizi, sanitasi, pendidikan, serta intervensi berbasis komunitas.

Dengan mengacu pada praktik tersebut, Pemprov Sultra optimistis dapat mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Melalui penguatan layanan kesehatan, edukasi gizi, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap kualitas generasi mendatang di Sulawesi Tenggara dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. (*)

HUT ke-62 Sultra, Baksos Kesehatan Gratis Jangkau Ratusan Warga

BAKTI SOSIAL KESEHATAN
DALAM RANGKA HUT SULAWESI TENGGARA YANG KE 62 TAHUN

“Harmoni Sultra dan Semarak Dirgantara”
Produktif untuk Sultra Sejahtera

ADAPUN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

OPERASI BIBIR SUMBING
23 s/d 24 April 2026
RSJP Oputa Yi Koo & RSU Alyyah 3
Kontak Person: dr Ariska Triantama Putra (TNI AU): 083881874874 | Muhammda Aji (D'Plastico): 08123049072

OPERASI KATARAK GRATIS
24 s/d 27 April 2026
RSUD Bahteramas
Kontak Person: dr Ariska Triantama Putra (TNI AU): 085801874674 | Riny Hapsari Hadju: 082226490798

SUNATAN MASSAL
22 April 2026
Aula Bahteramas Kantor Gubernur
Kontak Person: Riny Hapsari Hadju: 08225490798 | Ni Ketut Yuliasuti: 081344941996

Ayo Daftarkan Diri & Keluarga Anda!
Bersama Wujudkan Sultra Sehat & Sejahtera

SULTRA, BP-Ratusan warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Sulawesi Tenggara, dengan cakupan layanan mulai dari operasi katarak, bibir sumbing, hingga sunatan massal.

Kegiatan yang dipusatkan di Kendari ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis. Hingga pelaksanaan berjalan, program operasi katarak menunjukkan progres signifikan. Dari total kuota 50 peserta, sebanyak 32 orang telah menjalani tindakan medis, sementara jumlah pendaftar telah mencapai 40 orang. Sementara itu, layanan sunatan massal mencatat jumlah peserta yang cukup tinggi. Sebanyak 147 anak telah terdaftar dari kuota 250 peserta yang disediakan panitia.

Adapun untuk operasi bibir sumbing, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 30 peserta yang akan mendapatkan penanganan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan lembaga mitra.

“Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat,” ujar salah satu panitia pelaksana kegiatan. Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator bahwa kebutuhan terhadap layanan kesehatan gratis masih sangat besar, terutama di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra kemanusiaan, di antaranya Yayasan Smile Train untuk operasi bibir sumbing, Kalbe Farma untuk operasi katarak, serta Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) melalui program Kapal Kemanusiaan Sultra untuk sunatan massal.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia, dengan prevalensi yang cukup tinggi terutama pada kelompok usia lanjut. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat bahwa lebih dari 65 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Sementara itu, penanganan bibir sumbing melalui kerja sama internasional seperti yang dilakukan dengan Smile Train telah berlangsung sejak awal 2000-an dan membantu jutaan pasien di berbagai negara berkembang. “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat yang selama ini terkendala biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujar salah satu tenaga medis yang terlibat.

Bakti sosial kesehatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Sulawesi Tenggara yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan angka penyakit yang dapat dicegah melalui intervensi medis. (Mashuri)

Pemda Buton Apresiasi Edukasi OJK, Fokus Cegah SCAM dan Investasi



Pewarta: La Harman

BUTON, BP-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat Kabupaten Buton, Rabu (8/4/2026), sebagai upaya meningkatkan literasi finansial sekaligus mencegah maraknya praktik investasi ilegal dan penipuan berkedok keuangan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, pelajar, hingga perwakilan lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah Pasarwajo.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Indra Natsir Dahlan menegaskan bahwa edukasi keuangan menjadi program rutin yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tenggara.

"Selama ini masih terdapat kesenjangan antara tingkat penggunaan produk keuangan dengan pemahaman masyarakat. Dari hasil SNLIK, gap-nya sekitar 14,05 persen," ujar Indra dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat telah menggunakan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya

memahami risiko dan mekanisme produk yang digunakan.

Menurut Indra, situasi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi ilegal atau skema penipuan yang merugikan masyarakat.

"Seluruh aktivitas keuangan yang tidak berizin dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, maupun Bappebti harus diwaspadai. Masyarakat perlu memahami prinsip 2L, yakni Legal dan Logis," katanya.

Ia menambahkan, legal berarti lembaga atau produk tersebut memiliki izin resmi dan diawasi, sementara logis berkaitan dengan kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buton menyambut positif kegiatan tersebut dan menilai edukasi keuangan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, yang mewakili Bupati Buton, menyampaikan apresiasi atas kehadiran OJK yang secara langsung memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, kami

menyampaikan penghargaan kepada OJK yang telah memberikan pencerahan literasi keuangan kepada masyarakat," ujar Syamsudin.

Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius agar dapat meningkatkan pemahaman tentang sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan pencegahan penipuan.

"Literasi tidak hanya soal digital, tetapi juga literasi keuangan, moral, dan akhlak harus menjadi perhatian bersama," tambahnya.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah perbankan daerah seperti Bank Sultra dan Bank Bahteramas, yang turut mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Secara historis, upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak pembentukan OJK pada 2011, yang kemudian diikuti peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada 2013.

Berdasarkan data nasional, tingkat literasi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan dari sekitar 21,8 persen pada 2013 menjadi lebih dari 49 persen pada survei terbaru, meskipun masih

tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju.

Secara global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.

Fenomena investasi ilegal sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, terutama dengan berkembangnya platform digital yang memudahkan penyebaran skema penipuan lintas negara.

Dengan adanya edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin cermat dalam memilih produk keuangan serta mampu menghindari berbagai tawaran investasi yang tidak masuk akal.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta, khususnya kalangan pelajar yang menjadi salah satu sasaran utama peningkatan literasi keuangan sejak dini.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, OJK berharap tingkat literasi keuangan masyarakat dapat meningkat secara merata, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah. (*)

Lobi Pusat dan Provinsi, Bupati Buton Tengah Azhari Genjot Perbaikan Jalan



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di tengah keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu membiayai pembangunan secara maksimal.

Langkah strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Menurut Azhari, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci.

"Saat ini APBD kita belum memungkinkan untuk pembiayaan aspal jalan secara maksimal. Karena itu, kita terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi," ujar Azhari.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya terkait penanganan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Labungkari-Lakudo, termasuk titik prioritas Lombe - Waara yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Dalam pertemuan bersama pihak provinsi, Bupati juga men-

yampaikan langsung kebutuhan penanganan tersebut, termasuk melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Purnomo, sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi.

"Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini, karena dampaknya sangat besar bagi mobilitas masyarakat," katanya.

Selain koordinasi di tingkat provinsi, Bupati Azhari juga melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kendari usai menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa (31/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buton Tengah, Muh. Said, untuk memastikan progres usulan pembangunan jalan yang telah diajukan sebelumnya.

Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan di Buton Tengah telah masuk dalam sistem Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kini menunggu tahap realisasi pembangunan.

"Alhamdulillah, usulan kita sudah terinput di sistem Kementerian PU. Kita berharap tahun ini ada tambahan ruas jalan yang dapat dibangun," ujar Azhari.

Ia menambahkan bahwa progres pembanguan ruas Labungkari-RSUD yang hampir rampung menjadi indikator positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur lainnya di Buton Tengah.

Secara historis,

pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia telah menjadi prioritas nasional sejak era Orde Baru, terutama melalui program pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai program strategis nasional, termasuk peningkatan jalan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Secara global, Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional menilai bahwa investasi di sektor infrastruktur jalan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama di wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Azhari menilai bahwa Buton Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan konektivitas jalan yang memadai untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan akses pelayanan publik.

"Konektivitas yang baik akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pun optimistis bahwa melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera terealisasi.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)

Desa Jadi Kunci Eliminasi TB, Pemerintah Dorong Perluasan Program



Peliput: Warman

JAKARTA, BP- Pemerintah mempercepat perluasan program Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TB) sebagai strategi utama eliminasi penyakit menular tersebut di Indonesia, dengan menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pendampingan pasien, dan edukasi masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat terduga TB telah masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi landasan penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya dalam upaya menemukan dan mengobati kasus TB secara tuntas.

Dalam Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (6/4/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

"Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa

dan kelurahan," ujar Akhmad dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan, desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Peran ini memungkinkan prospek penemuan kasus dilakukan lebih cepat serta pendampingan pasien berlangsung lebih efektif.

Saat ini, dari total 84.276 desa di Indonesia, baru sekitar 5.711 desa yang telah membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB. Program tersebut tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota, sehingga perluasan cakupan menjadi prioritas pemerintah ke depan.

Pemerintah pun menetapkan 11 provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan TB, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta yang memiliki beban kasus tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P. Octavianus, menekankan bahwa eliminasi TB tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata.

"Keberhasilan eliminasi TB membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha,

dan media," ujarnya.

Ia menambahkan, media massa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik terkait gejala TB serta pentingnya menjalani pengobatan hingga tuntas.

"Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan tidak menghentikan pengobatan di tengah jalan," kata Benjamin.

Secara historis, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), Indonesia secara konsisten masuk dalam tiga besar negara dengan jumlah kasus TB terbanyak secara global dalam satu dekade terakhir.

Secara nasional, upaya pengendalian TB telah berlangsung sejak lama melalui program Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) yang mulai diperluas pada awal 2000-an. Program ini menekankan pengobatan terpantau untuk memastikan pasien menyelesaikan terapi.

Namun demikian, tantangan masih besar, terutama dalam hal penemuan kasus yang

belum dilaporkan (missing cases) serta tingginya angka pasien yang putus berobat. Kondisi ini berpotensi memicu resistensi obat dan memperpanjang rantai penularan.

Dalam konteks global, peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia setiap 24 Maret menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dunia dalam mengakhiri epidemi TB. Target global yang dicanangkan WHO adalah eliminasi TB pada 2030.

Program Desa/Kelurahan Siaga TB dinilai sebagai pendekatan berbasis komunitas yang efektif. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mengenali gejala, melaporkan kasus, serta mendukung pasien selama masa pengobatan.

"Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus, mendampingi pasien, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama melawan TB," tegas Akhmad.

Izin Vaksin MR Dewasa Terbit, 290 Ribu Dosis Disiapkan untuk Nakes



JAKARTA, BP- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan setelah terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) untuk kelompok usia dewasa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menekan risiko penularan di tengah meningkatnya kasus di sejumlah daerah.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa persetujuan tersebut telah melalui evaluasi ilmiah yang ketat. Vaksin yang mendapat izin meliputi MR, MMR, serta vaksin campak tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmith-Kline, dan Merck Sharp Dohme.

"Persetujuan ini merupakan hasil kajian berbasis data ilmiah dan menjadi bagian dari komitmen kami memastikan keamanan serta khasiat vaksin," ujar Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4).

Dengan adanya izin tersebut, Kementerian Kesehatan segera menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin. Tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki tingkat risiko tertinggi.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, L. Rizka Andalusia, mengatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap potensi penularan di fasilitas layanan kesehatan.

"Nah tentunya dengan adanya KLB ini, potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes, menjadi sangat besar," kata Rizka.

Secara rinci, sasaran vaksinasi mencakup 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan yang tersebar di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi. Selain itu, sebanyak 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship juga masuk dalam prioritas.

Total kebutuhan vaksin untuk kelompok dewasa prioritas ini diperkirakan mencapai sekitar 290 ribu dosis. Pemerintah memastikan jumlah tersebut dapat terpenuhi tanpa mengganggu program imunisasi rutin.

Rizka menegaskan bahwa stok vaksin nasional dalam kondisi aman. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, ketersediaan vaksin MR tercatat mencapai 9,8 juta dosis yang cukup untuk sekitar 5,5 bulan ke depan.

"Kami menjaga agar stok tetap tersedia di seluruh daerah tanpa berlebihan, sehingga tidak berisiko rusak," ujarnya.

Pengelolaan distribusi vaksin dilakukan melalui sistem digital SMILE yang terintegrasi dalam platform Satu Sehat Logistik. Sistem ini memungkinkan pemantauan ketersediaan vaksin secara real-time hingga tingkat puskesmas.

Secara historis, Indonesia pernah menghadapi lonjakan kasus campak yang signifikan sebelum penguatan program imu-

nisasi nasional. Pada 2017-2018, pemerintah bahkan menggelar kampanye imunisasi MR besar-besaran untuk menekan penyebaran penyakit ini di berbagai wilayah.

Di tingkat global, World Health Organization mencatat bahwa campak masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak yang dapat dicegah dengan vaksin. Pada awal dekade 2000-an, jutaan kasus terjadi setiap tahun, sebelum akhirnya menurun berkat perluasan cakupan imunisasi.


Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara kembali melaporkan peningkatan kasus campak akibat penurunan cakupan vaksinasi dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia untuk memperluas perlindungan hingga kelompok usia dewasa, khususnya bagi mereka yang berada di garis depan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkes juga mengingatkan pentingnya imunisasi dasar bagi anak sebagai langkah pencegahan utama. Vaksin campak diberikan pada usia 9 bulan, 18 bulan, serta dosis penguat saat anak memasuki usia sekolah dasar.

"Jangan menunggu wabah. Imunisasi anak harus segera dilengkapi sesuai jadwal," kata Rizka.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan sekaligus menekan penyebaran campak secara lebih luas di masyarakat. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p>  <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Polisi Ringkus Wanita Ngaku Pegawai KPK, Tipu Sahroni Rp300 Juta



Polda Metro Jaya berhasil menangkap perempuan yang mengaku sebagai pegawai KPK gadungan dan diduga menipu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Seorang perempuan yang mengaku sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap aparat Polda Metro Jaya setelah diduga menipu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan kejadian tersebut pada 9 April 2026.

Peristiwa penipuan tersebut sebenarnya bermula lebih awal, yakni pada 6 April 2026, ketika Sahroni tengah mengikuti rapat di ruang Komisi III Gedung DPR RI, Jakarta. Di tengah rapat, ia mendapat informasi dari stafnya mengenai seseorang yang mengaku sebagai pejabat KPK dan meminta waktu untuk bertemu.

Tanpa memiliki janji sebelumnya, perempuan tersebut kemudian menemui Sahroni dan mengklaim dirinya sebagai Kepala Biro Penindakan KPK. Ia menyebutkan kedatangannya atas perintah pimpinan lembaga antirasuah.

Dalam pertemuan itu, pelaku meminta uang sebesar Rp300 juta dengan dalih untuk mendukung kegia-

tan pimpinan KPK. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung di lingkungan gedung DPR RI.

Sahroni mengakui bahwa dirinya sempat menyerahkan uang tersebut. "Duit memang sudah diserahkan. Kenapa itu duit diserahkan? Ya karena kalau mau menangkap orang ya saya harus serahin," ujarnya dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat (11/4).

Namun, belakangan Sahroni menyadari adanya kejanggalan. Ia menegaskan bahwa permintaan uang tersebut tidak berkaitan dengan pengurusan perkara hukum tertentu. "Tidak ada urusan perkara, dia minta uang langsung atas nama pimpinan KPK," kata Sahroni.

Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah laporan resmi diterima oleh pihak kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan segera dilakukan hingga pelaku berhasil diamankan.

"Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap TH alias D (48)," ujar Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (11/4).

Dari tangan

pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain stempel palsu KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda yang diduga digunakan untuk mendukung aksinya.

Menurut Budi, pelaku secara sengaja mencatut nama lembaga negara untuk meyakinkan korban. "Pelaku mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dan mengaku sebagai pegawai KPK atas perintah pimpinan," ujarnya.

Saat ini, pelaku dijerat dengan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun jaringan yang terlibat dalam praktik serupa.

Kasus penipuan dengan modus mencatut nama lembaga penegak hukum bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat kepolisian kerap menungkap praktik serupa yang memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Secara historis, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdiri sejak 2002 memiliki reputasi kuat dalam pemberantasan korupsi, sehingga namanya kerap disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan penipuan.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, pelaku penipuan kerap mengatasnamakan lembaga seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menipu korban melalui telepon atau pertemuan langsung.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap segala bentuk permintaan uang yang mengatasnamakan institusi resmi. "Kami mengimbau masyarakat segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan modus serupa," kata Budi.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan dengan modus impersonasi lembaga negara terus berkembang, sehingga diperlukan kehati-hatian serta verifikasi yang ketat dalam setiap interaksi yang melibatkan institusi resmi. (*)

Soedeson Tantang ICW Ungkap Negara yang Rampas Aset Tanpa Pidana



Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menantang Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengungkap negara yang bisa melakukan perampasan aset tanpa ada putusan pidana atau non-conviction based (NCB) asset forfeitur.

Laporan: Hadi

Jakarta, -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menantang Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengungkap negara yang bisa melakukan perampasan aset tanpa ada putusan pidana atau non-conviction based (NCB) asset forfeitur.

"Kita mau menerima masukan dari ICW. Kasih kepada kami. Mana contoh-contoh negara-negara? Kan beliau di situ mengatakan ratusan ya? Enggak usah ratusan deh, lima aja negara yang sudah menerapkan undang-undang ini dan berhasil," ujar Soedeson saat dihubungi, Jumat (10/4).

Soedeson menegaskan pihaknya bukan menolak usulan agar perampasan aset bisa dilakukan lewat gugatan perdata. Dia mengaku, hanya mewanti-wanti agar mekanisme perampasan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset harus hati-hati.

Menurut Soedeson, pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR justru merupakan bentuk dukungan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Tetapi pemberantasan korupsi apa pun tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya, kan begitu," ujar dia.

Anggota DPR asal daerah pemilihan Papua itu menjelaskan selama ini Indonesia menganut sistem hukum pidana berdasarkan orang (in persona), dan bukan barang (in rem). Hanya lewat RUU Perampasan, prinsip in rem baru akan diterapkan.

"Nah, kita harus hati-hati karena kebendaan itu sendiri mempunyai hukumnya sendiri, kan begitu kan. Banyak sekali terjadi tabrakan," kata Soedeson.

Dia misalnya mempertanyakan, apakah negara bisa merampas harta hasil kejahatan yang sudah berpindah tangan kepada orang lain dengan cara yang sah. Sebab, UUD juga mengatur perlindungan terhadap harta kekayaan setiap warga negara.

"Pihak ketiga itu juga dilindungi oleh hukum, ya kan. Nah pertanyaannya, kepentingan negara atau kepentingan warga negara yang harus dilindungi?" Ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas lanjutan

RUU Perampasan Aset di Komisi III, Soedeson sebelumnya mewanti-wanti bahwa sejumlah beleid dalam RUU tersebut bisa menabrak konstitusi.

Merujuk Pasal 6 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, misalnya kata dia, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah tanpa putusan hakim yang sah.

"Ini persoalan yang menjadi pemikiran saya sejak awal. Karena perampasan aset ini fokusnya pada in rem, kepada barang. Padahal karakter kita ini civil law, 'barang siapa', in persona," ujar Soedeson dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Merespons itu, peneliti ICW Yas-sar Aulia menyuarakan pandangan Soedeson yang menyebut RUU Perampasan Aset berfokus pada in rem (barang) tanpa pemidanaan, bukan in persona (seseorang).

"Justru pendekatan in rem atau non-conviction based forfeiture dalam pemberantasan korupsi sudah diadopsi oleh banyak negara yang kualitas penjaminan hak asasi manusianya jauh lebih baik dari Indonesia," terang dia. (*)

Baubau Optimistis Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran, BSKDN Kemendagri Verifikasi Kinerja Baubau



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Kota Baubau memasuki tahap krusial dalam penilaian kinerja kepala daerah tingkat nasional setelah tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan verifikasi lapangan, Senin (8/4/2026). Tahap ini menjadi penentu akhir atas capaian daerah dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan.

Verifikasi tersebut dilakukan menyusul keberhasilan Baubau melewati tahapan presentasi awal dan wawancara daring bersama Wakil Wali Kota. Dari seluruh wilayah Sulawesi, hanya tiga daerah yang lolos ke tahap ini, yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kolaka, dan Kota Baubau.

Analisis SDMA Ahli Pertama BSKDN, Raheldin Rosrith Fraidy Aiyal, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan validitas data yang telah disampaikan pemerintah daerah sebelumnya.

"Kami memastikan apakah dokumen yang dipaparkan sesuai dengan fakta di lapangan. Ini tahap penting sebelum penilaian akhir," ujar Raheldin.

Ia menambahkan

kan, hasil sementara menunjukkan capaian Baubau cukup menonjol dibandingkan daerah lain, khususnya dalam menekan angka pengangguran secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara historis, data nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia sempat meningkat tajam pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga menyentuh lebih dari 7 persen, sebelum berangsur turun pada tahun-tahun berikutnya. Tren penurunan ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Baubau.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Baubau mencatat penurunan TPT dari sekitar 8 persen pada 2022 menjadi 6 persen pada 2025. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan penguatan sektor ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Baubau, Amalia, menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.

"Penurunan pengangguran tidak ha-

nya bertumpu pada satu OPD, tetapi melibatkan banyak pihak, mulai dari pelatihan UMKM hingga dukungan sektor perikanan," kata Amalia.

Ia menjelaskan, sejumlah organisasi perangkat daerah turut berperan aktif, di antaranya dinas yang menangani UMKM, perikanan, serta sektor teknis lainnya yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim verifikasi adalah aplikasi Layanan Konseling Karier Tenaga Kerja (LAKORETE). Aplikasi ini mempermudah pencari kerja dalam mengakses layanan dan mempercepat proses administrasi ketenagakerjaan.

"Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melapor secara mandiri dan proses penerbitan kartu kerja menjadi lebih cepat dan efisien," ujar Raheldin.

Di tingkat global, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization mencatat bahwa pemulihan pasar tenaga kerja pasca-pandemi menjadi tantangan banyak negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Upaya

yang dilakukan Baubau dinilai sejalan dengan tren global tersebut.

Selain inovasi, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting. Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan sekitar 1,7 persen dari total APBD untuk program yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.

Amalia menambahkan, capaian ini semakin membanggakan karena Baubau mampu bersaing dan mengungguli kota-kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Kendari, Bitung, dan Palopo dalam tahap seleksi regional.

"Alhamdulillah, Baubau keluar sebagai daerah terbaik kategori kota di regional Sulawesi," ujarnya.

Dengan hasil verifikasi yang menunjukkan kesesuaian data dan implementasi di lapangan, Pemerintah Kota Baubau optimistis dapat meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri.

Tahapan ini menjadi penentu akhir sebelum pengumuman resmi oleh Kemendagri, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam mengelola isu ketenagakerjaan secara berkelanjutan. (*)

Pesan Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah di Kande-Kandea Tampuna, Pembangunan Harus Menjangkau Semua Wilayah Hingga Dipinngiran



BAUBAU, BP-Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, menegaskan komitmen pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran saat menghadiri pesta adat Kande-Kandea di Baruga Tampuna, Senin malam (6/4/2026).

Penegasan tersebut disampaikan di hadapan masyarakat Kelurahan Tampuna yang menyambut kehadiran pemerintah daerah dalam suasana penuh kekeluargaan. Momentum budaya ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga terkait arah pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wawali menekankan bahwa Kota Baubau yang terdiri dari 43 kelurahan harus dibangun secara adil tanpa memandang letak geografis.

"Kami tidak akan melupakan wilayah yang berada di ujung kota. Pembangunan harus merata dan dirasakan seluruh masyarakat," ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.

Ia menjelaskan, pemerintah kota saat ini tengah memprioritaskan sejumlah sektor dasar, di antaranya penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan lingkungan, pembangunan irigasi guna mendukung pertanian, serta perbaikan akses jalan bagi wilayah pinggiran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks ketahanan pangan,

Tampuna dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu basis produksi pertanian di Kota Baubau. Hal ini menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan lokal.

"Kita belajar dari pengalaman, ketika pasokan bergantung dari luar daerah, harga bisa melonjak. Kita ingin produksi lokal diperkuat," katanya.

Ia mencontohkan lonjakan harga telur yang sempat mencapai Rp100.000 per rak menjelang Idulfitri akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah.

Fenomena tersebut, menurutnya, bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga mencerminkan tantangan nasional dalam menjaga stabilitas harga pangan. Secara historis, Indonesia beberapa kali mengalami gejolak harga pangan, termasuk saat krisis ekonomi 1998 dan gangguan distribusi global pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2022.

Di tingkat global, ketahanan pangan juga menjadi isu strategis. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat bahwa krisis pangan dunia kerap dipicu oleh konflik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok internasional.

Karena itu, Wawali menilai penguatan produksi lokal menjadi langkah penting untuk menciptakan kemandirian daerah sekaligus menjaga stabilitas harga.

Selain isu pembangunan, Wawali juga mengapresiasi pelaksanaan tradisi Kande-Kandea yang dinilai sarat nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakat.

"Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk syukur atas panen, kesehatan,

dan keamanan yang kita rasakan bersama," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Tampuna kali ini merupakan yang kedua, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Sejumlah capaian pembangunan juga mulai dirasakan warga, salah satunya kehadiran infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang meningkatkan akses komunikasi di wilayah tersebut.

Meski demikian, ia mengakui masih ada harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah, kata dia, terus berupaya merealisasikan program pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

"Kami memahami masih ada kekurangan. Namun, semua sedang berproses dan akan terus kami perjuangkan," tuturnya.

Pesta adat Kande-Kandea sendiri merupakan tradisi masyarakat Buton yang telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan hidup. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga sekaligus menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomi.

Sinergi antara budaya dan pembangunan, menurut Wawali, menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkelanjutan. (*)